



**Judul** : Genjot kualitas SDM, Anggota DPR minta Poltekpar diperbanyak  
**Tanggal** : Sabtu, 06 September 2025  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 3

Genjot Kualitas SDM

## Anggota DPR Minta Poltekpar Diperbanyak

KOMISI VII DPR meminta Kementerian Pariwisata (Kemenpar) memperbanyak Politeknik Pariwisata (Poltekpar). Langkah ini dinilai penting agar bisa membuka lebih banyak lapangan pekerjaan, sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor pariwisata.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mengatakan, pariwisata Indonesia punya keunggulan dibanding negara lain dari segi keramahan masyarakat. Anak muda punya peluang besar bekerja di sektor pariwisata, meski jumlah politeknik sebagai tempat pembelajaran dan peningkatan kompetensi masih minim.

"Ini disayangkan, padahal potensi untuk memperkuat sektor pariwisata Indonesia terbilang sangat besar," ucap Rahayu dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/9/2025).

Dia meminta Kemenpar be-

lajar dari kasus di Jerman serta Jepang yang kekurangan pekerja. Kebutuhan lapangan pekerjaan di Jerman diperkirakan menyentuh 2,5 juta. Hal yang sama juga terjadi di Jepang, pekerjaan lebih banyak berasal dari negara asing dibanding masyarakat lokal, akibat kurangnya sumber daya manusia.

Kondisi ini, lanjut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu, bisa menjadi peluang besar bagi pekerja asal Indonesia. Agar bisa bersaing, kemampuan berbahasa dan kualitas pekerja perlu terus ditingkatkan, dan memperbanyak poltekpar bisa jadi salah satu kuncinya.

"Kita perlu mendukung Kemenpar menghadirkan politeknik yang lebih besar lagi," kata dia.

Senada, anggota Komisi VII DPR Rico Sia menyampaikan, penambahan politeknik di daerah sangat krusial. Terutama di wilayah yang jadi tujuan wisata seperti Papua. Wilayah ini memiliki destinasi wisata indah namun kekurangan sumber daya



Rahayu Saraswati Djojohadikusumo

manusia berkualitas.

"Harapan kami, politeknik tidak lagi harus ke Sulawesi atau Bali, tapi bisa dibangun di Papua. Wilayah ini memiliki destinasi wisata indah namun kekurangan sumber daya

Sejalan dengan itu, Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay menyinggung soal percepatan pembahasan RUU Kepariwisataan. Draf perubahan ketiga atas UU Nomor 10 Tahun 2009 itu sebenarnya sudah hampir selesai.

"Tinggal sedikit lagi kemarin.

"Kalau situasi tenang, itu sudah selesai," ucapnya.

Dia menjelaskan, pembahasan sempat ditunda karena dinamika politik yang terjadi pekan lalu. DPR ingin memberi ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi agar tidak terkesan terburu-buru.

Kendati demikian, anggota Fraksi Partai Amanat Nasional itu memastikan, pembahasan akan segera digelar kembali dalam beberapa hari ke depan. Bersamaan dengan agenda tersebut, Komisi VII juga menggelar rapat dengan Kemenpar, membahas rencana kerja dan anggaran.

Dia mendorong penambahan anggaran bagi kementerian tersebut. Hal ini karena dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) yang akan segera disahkan, ada perluasan porsi tugas yang tak bisa ditopang dengan anggaran lama.

"Butuh anggaran baru. Nggak bisa sama dengan anggaran sebelumnya yang masih undang-undang lama," pungkasnya. ■ PYB